



Eksplorasi Problem-problem Kultural dalam Praktik Layanan Konseling dan Strategi Praktis untuk Meminimalisasinya

Nora Yuniar Setyaputri¹, Dini Rakhmawati², Mulawarman³

Universitas Negeri Semarang¹, Universitas PGRI Semarang², Universitas Negeri Semarang³

setyaputrinora@students.unnes.ac.id¹, dinirakhmawati@upgris.ac.id²,
mulawarman@mail.unnes.ac.id³

ABSTRACT

Multicultural insight is an important thing that needs to be mastered by a counselor in order to be able to provide effective counseling services. The purpose of the study in this paper is to explore cultural issues which in essence need to be recognized as a separate color in the practice of counseling services and present practical strategies to minimize the occurrence of these problems. Based on the points that have been studied, it is suggested that guidance & counseling teachers/ counselors and undergraduate guidance & counseling students can broaden their multicultural insights, one of which is by understanding cultural problems and implementing practical strategies to minimize these problems.

Keywords: cultural problem, counseling, practical strategies

ABSTRAK

Wawasan multibudaya merupakan satu hal penting yang perlu dikuasai oleh seorang konselor agar mampu memberikan layanan konseling yang efektif. Tujuan kajian pada paper ini adalah untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan budaya yang pada hakikatnya perlu diakui dapat menjadi pewarna tersendiri dalam praktik layanan konseling serta menyajikan strategi-strategi praktis untuk meminimalisasi terjadinya problem tersebut. Berdasarkan poin-poin yang telah dikaji, maka disarankan kepada Guru BK/ Konselor maupun mahasiswa S1 BK dapat memperluas wawasan multibudayanya, salah satunya dengan memahami problem-problem kultural dan menerapkan strategi praktis untuk meminimalisasi problem tersebut.

Kata Kunci: problem kultural, konseling, strategi praktis

PENDAHULUAN

Beberapa hal yang sering diperdebatkan sampai pada saat ini adalah adanya perbedaan sudut pandang mengenai konteks keragaman budaya dalam praktik layanan konseling. Sebagian konselor meyakini bahwa pengalaman dan keterampilan konseling yang mereka miliki sudah memadai sebagai bekal untuk melaksanakan layanan konseling. Sebagian konselor ini juga menganggap bahwa perbedaan persepsi antara konselor dan konseli dalam proses konseling sudah termasuk perbedaan budaya. Namun di sisi lain, beberapa konselor berpendapat bahwa isu-isu budaya yang melatarbelakangi konselor dan konseli tidak sesederhana itu. Sebagian konselor ini mengakui bahwa konselor sangat penting untuk dapat memahami hubungan-hubungan antara berbagai budaya dan memiliki pengetahuan tentang latar belakang budaya dari konseli supaya konseling dapat dilaksanakan lebih efektif (Constantine & Sue, 2005; Corey, 2017; Setyaputri, et.al., 2020). Matsumoto (2008) yang menyatakan bahwa sebagai konselor



kita perlu terbuka terhadap kemungkinan adanya suatu konflik yang muncul dalam proses konseling merupakan suatu hal yang bersifat kultural. Dapat diurai lebih lanjut, seringkali kita sebagai konselor terburu-buru mengatribusikan sebab dari konflik konseli merupakan kekurangan dari konseli. Apabila dilihat lebih dalam, konseli berada pada pengaruh budaya yang melatarbelakangi mereka.

Konselor diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai budaya, baik yang melatarbelakangi dirinya sendiri dan juga diri konseli. Tentunya proses internalisasi bukan hanya sekedar sejauh mata memandang perihal baik atau buruk, benar atau salah, logis atau tidak logis. Namun, benar-benar dapat menghayati pengaruh nilai-nilai tersebut yang nantinya akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan diwujudkan dalam perilaku. Terkait isu-isu budaya dalam praktik layanan konseling, konselor perlu memahami bagaimana konsep *emic view*. Pendapat ini didukung oleh Mappiare-AT (2011; 2020) yang menyatakan bahwa ilmu Bimbingan dan Konseling merupakan sebuah realitas subjektif, dimana dalam proses pembangunannya hendaknya lebih memilih *emic view* daripada *etic view*. Mappiare-AT juga memaparkan bahwa pada kajian ilmu BK perlu dibangun dengan memperhatikan sudut pandang lokal, pengharapan subjek, penghayatan para pemakai, pemahaman yang bumi, bukan ditekankan pada pandangan teoretik yang sudah dibangun di negara lain. Setyaputri (2022) menambahkan bahwa pengetahuan serta pemahaman mengenai penarikan nilai-nilai budaya lokal menggunakan sudut pandang *emic* ini dipakai untuk menjembatani perbedaan budaya yang melatarbelakangi konselor/ Guru BK dengan konseli/ siswa.

Namun, ada masanya *etic view* perlu digunakan. Jika mamakai sudut pandang *emic* dirasa akan merugikan konseli, kita dapat menggunakan sudut pandang *etic* untuk menjembatannya. Senada dengan pendapat Stuart (2004) bahwa dalam proses internalisasi ini, konselor tidak harus selalu menerima segala hal dari perspektif konseli adalah suatu hal yang sehat. Contoh yang dipaparkan oleh Stuart adalah ketika seorang konseli datang mengeluhkan suaminya suka melakukan kekerasan fisik pada dirinya. Dimana menurut konseli, di lingkungan keluarga suaminya kekerasan fisik dalam rumah tangga ini wajar dilakukan. Konselor memiliki kewajiban profesional untuk mencegah kekerasan ini demi penghargaan terhadap keragaman kultural secara umum. Dengan terinternalisasikannya wawasan multibudaya dalam diri konselor diharapkan dapat meminimalisasi persoalan-persoalan budaya yang mungkin dapat mengganggu proses layanan konseling. Minimal pelabelan pada konseli karena perbedaan penggunaan bahasa, pemilihan kata, cara pandang, status sosial, *gender*, dan lain sebagainya akan tereduksi. Setyaputri, et.al. (2021) menambahkan bahwa terjadinya pelabelan ini karena kurangnya internalisasi wawasan multibudaya yang dimiliki konselor. Selanjutnya Tirmizi (2008) bahwa adanya stereotip atau pelabelan tersebut dapat menciptakan konflik dan ketegangan dalam kelompok.



Berdasarkan pemaparan di atas, maka paper ini disusun dengan tujuan untuk mengeksplorasi persoalan-persoalan budaya yang pada hakikatnya perlu diakui dapat menjadi pewarna tersendiri dalam praktik layanan konseling. Serta menyajikan strategi-strategi praktis untuk meminimalisasi terjadinya problem dalam praktik layanan tersebut. Topik ini dirasa penting untuk dibahas guna menambah wawasan multibudaya para praktisi maupun akademisi BK, maupun para mahasiswa BK yang nantinya akan menjadi Guru BK/ Konselor baik di sekolah maupun di luar sekolah. Eksplorasi problem-problem budaya dalam praktik layanan konseling yang akan dipaparkan dalam bagian pembahasan meliputi: faktor-faktor pemicu problem kultural dalam praktik konseling, serta strategi praktis untuk meminimalisasi problem kultural dalam praktik konseling.

PEMBAHASAN

Mengacu pada kajian di bagian pendahuluan mengerucutkan pada sebuah bahasan mengenai latar belakang budaya seseorang yang dapat memengaruhi bagaimana dia mengkonsep dirinya. Sama halnya terjadi pada diri konselor maupun konseli dimana hal ini dapat mempengaruhi keefektifan proses konseling. Persoalan budaya ini tidak hanya bersifat umum namun juga bersifat khusus. Oleh karena itu, konselor sangat perlu memiliki pengetahuan khusus tentang isu-isu kultural ini guna melayani konseli yang universal. Poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai faktor-faktor pemicu problem kultural dalam praktik konseling.

Faktor-Faktor Pemicu Problem Kultural dalam Praktik Konseling

Poin ini disajikan untuk menambah wawasan konselor mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memicu munculnya konflik atau problem kultural dalam praktik konseling. Hal ini dirasa sangat penting untuk diulas karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa dimensi kultural yang dapat mempengaruhi individu dalam memandang dunianya dan tentunya mempengaruhi individu tersebut dalam berpikir, merasa, dan berperilaku (Constantine & Sue, 2005; Matsumoto, 2008). Senada dengan pernyataan tersebut, *APA Multicultural Guidelines* (2003) mengutarakan bahwa sikap respek terhadap warisan budaya ini sangat perlu dibangun untuk mereduksi adanya diskriminasi, penindasan, maupun rasisme.

Faktor-faktor kultural ini meliputi dimensi spiritualitas, gender, bahasa, sikap-sikap keluarga, ekspresi emosi, serta perbedaan harapan antara konselor dan konseli (Sue & Sue, 1990; Lee & Richardson, 1991, Geldard & Geldard, 2011). Sangat dianjurkan bagi seorang konselor untuk memahami pengaruh dari faktor-faktor kultural tersebut ketika melayani konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda (Laungani, 2002). Yang pertama dibahas adalah problem yang muncul jika adanya miskonsep mengenai dimensi **spiritualitas**. Spiritualitas merupakan aspek inti dari identitas individu (Loewenthal, 2007), dan apabila keyakinan ini didebat atau dipertanyakan



maka orang yang mempertanyakan hal tersebut cenderung akan dihindari (Geldard & Geldard, 2011). Konselor perlu memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai dimensi ini agar problem tersebut tidak terjadi. Keyakinan masyarakat Timur (termasuk Indonesia) lebih terpusat pada pemikiran dan kesadaran spiritual yang dipengaruhi oleh fisik dan metafisik, serta natural dan supranatural. Maka, sering dijumpai dalam proses konseling pada pada konseli di kultur Timur ini mengemukakan gangguan psikis yang sedang dideritanya berhubungan dengan guna-guna, ilmu sihir, gangguan roh, kurangnya keyakinan diri terhadap kuasa Tuhan dan sejenisnya. Berbeda dengan keyakinan pada kultur Barat, keyakinan spiritualitas mereka lebih condong pada hal-hal yang dapat terlihat, dapat diukur, dan nampak. Ukuran logis atau tidak logis menjadi sangat berbeda jika ditilik dari sudut pandang spiritualitas Timur dan Barat.

Faktor selanjutnya adalah pemahaman mengenai **gender**. Faktor ini berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, dimana pola-pola interaksi antara laki-laki dan perempuan serta tuntutan peran yang berbeda. Misalnya dalam lingkungan pondok pesantren yang umumnya santri laki-laki dan perempuan dibedakan tempatnya dapat membentuk pola interaksi yang berbeda dengan sekolah umum dimana peserta didik laki-laki dan perempuan menjadi satu tempat. Pola interaksi ini juga dapat berdampak pada seorang konselor yang pernah belajar di pondok pesantren ketika memberikan layanan pada konseli yang berbeda jenis kelamin. Sikap canggung, enggan menatap mata konseli, bahkan kecemasan dapat muncul pada diri konselor saat proses konseling berlangsung. Selain pola interaksi, terdapat pula tuntutan peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Meskipun emansipasi telah dielu-elukan, perbedaan peran gender ini masih menjadi persoalan bagi kelompok tertentu. Pada umumnya, perempuan lebih dituntut untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan laki-laki adalah panutan. Meskipun perempuan sebagai istri bergelar tinggi, mempunyai jabatan yang tinggi, serta membantu mencari nafkah, dia harus tetap berbakti pada suaminya. Ketika di rumah dia pun harus melepas atributnya ketika di tempat kerja untuk benar-benar dapat mengurus suani dan anak-anaknya. Bagi kelompok tertentu peran ini tidak boleh tertukar. Namun, bagi kelompok lain bisa jadi peran gender ini dapat saling menggantikan, melengkapi antara peran laki-laki yang mungkin tidak bisa dilakukan bisa diberikan kepada perempuan agar tujuan hidup mereka dapat tercapai. Jika konselor dan konseli berada pada budaya gender yang berbeda, hal ini bisa menjadi penghambat kelancaran proses konseling.

Faktor berikutnya adalah penggunaan **bahasa**. Bahasa yang digunakan dalam proses konseling sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi antara konselor dan konseli (Lee & Richardson, 1991; Matsumoto, 2008). Problem terkait bahasa ini sering dialami oleh konselor yang ditugaskan di tempat baru. Bahasa, gaya berbahasa, dan pilihan kata individu yang terdapat dalam satu daerah namun berbeda kelompok bisa jadi berbeda, apalagi mereka yang benar-benar berada pada daerah yang berbeda. Maka,



sangat perlu kehati-hatian yang cukup baik untuk menyikapi hal ini, karena kata-kata, bahasa, maupun gaya berbahasa sangat mudah sekali disalah artikan.

Selanjutnya adalah **sikap-sikap keluarga besar** dalam mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Misalnya, dalam kasus konseli dengan latar belakang budaya ketimuran sedang kebingungan untuk memilih pasangan hidup, terkait apakah sesuai kriteria keluarganya atau pilihannya sendiri. Konselor perlu berhati-hati dalam melayani konseli tersebut. Apabila secara umum konselor mengadopsi budaya barat dalam praktik konseling dan mendorong konseli untuk memilih mana yang lebih nyaman bagi dirinya serta mendorong untuk lebih mandiri dalam mengambil keputusan, bisa jadi hal ini dapat menimbulkan konflik yang lebih besar bagi diri konseli. Konselor perlu menghormati latar belakang budaya konseli, dimana sikap-sikap keluarga besar dalam konteks budaya ketimuran sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan konseli. Sebagian besar sikap-sikap keluarga besar dalam adat ketimuran ini cenderung mengatur akan menjadi apa dan siapa yang ada dalam lingkup keluarganya untuk mempertahankan *nasab* baik keluarga. Konsekuensi anggota keluarga yang melanggar aturan tersebut bisa dijauhkan dari interaksi keluarga besar. Hal ini didukung oleh pendapat Cross & Papadopoulos (2001) yang menyatakan bahwa konsep diri, harga diri, bahkan prasangka seseorang awalnya berkembang dari konsteks keluarga mereka. Maka, dalam mendorong konseli agar bisa mengambil keputusan secara mandiri tersebut konselor perlu memahami betul nilai-nilai budaya yang melatarbelakangi konseli. Agar konsep nyaman dan kemandirian dalam menentukan pilihan benar-benar dapat dipertimbangkan sematang mungkin agar tidak muncul konflik baru dalam diri konseli.

Kemudian problem yang disebabkan oleh **ekspresi emosi** yang berbeda. Kemampuan individu untuk mengekspresikan emosi bergantung pada latar belakang budaya mereka. Misalnya konseli yang mempunyai riwayat menjadi korban *bully*, sering ditekan oleh orang tuanya, anak-anak jalanan, serta konseli-konseli yang berasal dari lingkungan keluarga *broken home* mempunyai kemampuan mengekspresikan emosi yang sangat berbeda. Mereka cenderung mudah menampakkan ekspresi emosi negatif untuk menutupi perasaan mereka yang sebenarnya sangat halus dan sering terluka. Berkaitan dengan hal ini, ekspresi wajah konselor perlu ditata ketika merespon cerita konseli. Selain itu saat melakukan normalisasi. Konselor menganggap luapan emosi konseli adalah suatu hal yang wajar, namun bagi mereka tidak. Perbedaan pemahaman mengenai ekspresi emosi ini nampak sederhana, namun perlu untuk diperhatikan agar konseli tetap merasa nyaman melakukan sesi konseling dengan konselor.

Faktor terakhir yang dibahas dalam paper ini adalah perbedaan **harapan** antara konselor dan konseli. Sue & Sue (1990) mengemukakan bahwa harapan-harapan umum konselor seringkali tidak dapat membantu



konseli dalam kelompok budaya tertentu. Akan menjadi sebuah hal rumit bagi konseli yang terbiasa hidup dituntun atau didikte untuk mandiri dalam mengambil keputusan pada sesi konseling. Harapan konselor agar konseli dapat secara mandiri mengambil keputusan terbaik bagi hidupnya sulit terwujud bagi konseli tersebut.

Strategi Praktis untuk Meminimalisasi Problem Kultural dalam Praktik Konseling

Strategi yang pertama berkaitan dengan problem kultural yang disebabkan oleh dimensi spiritualitas. Sims (2007) mengemukakan beberapa hal yang dapat didaptasi oleh konselor untuk menyikapi problem kultural yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Beberapa hal tersebut antara lain: konselor dapat memahami poin apa yang dianggap penting dalam diri konseli termasuk mengenai bagaimana cara mereka memaknai hidup; menumbuhkan rasa solidaritas dalam diri konselor; memandang orang lain secara utuh; memahami makna apa yang dianggap baik maupun buruk, menyenangkan ataupun tidak, benar atau salah; dan *awareness of God* atau kesadaran akan adanya Tuhan dapat membantu konselor untuk menerima orang lain apa adanya.

Strategi praktis selanjutnya adalah untuk meminimalisasi terjadi problem kultural karena faktor gender, sikap-sikap keluarga besar yang mempengaruhi pengambilan keputusan konseli, ekspresi emosi, serta harapan konselor dan konseli yang berbeda. Geldard & Geldard (2011) merumuskan beberapa pertimbangan-pertimbangan etis yang dapat konselor gunakan, seperti: konselor perlu menanyakan secara terus terang kepada konseli mengenai identitas budayanya; konselor perlu mengatasi prasangka dan penilaian subjektifnya terhadap konseli; cara kerja yang fleksibel perlu diterapkan untuk konseli dengan budaya yang berbeda dengan konselor; serta konselor perlu menjalin hubungan yang selaras dengan konseli, dimana hal ini terkait dengan konsistensi konselor mengenai tanggung jawabnya membantu konseli daripada mengedepankan orientasi pribadinya.

Strategi praktis berikutnya untuk meminimalisasi problem kultural yang disebabkan oleh bahasa. Pada saat awal sesi konseling, konselor dapat membuat kesepakatan dengan konseli mengenai bahasa apa yang akan digunakan. Pilihan terakhir jika konselor benar-benar belum memahami bahasa konseli, konselor dapat memakai jasa *interpreter* atau penerjemah. Pemakaian jasa penerjemah ini tentunya juga atas persetujuan konseli dan konselor perlu memastikan bahwa *interpreter* dapat menjaga kerahasiaan permasalahan konseli.



KESIMPULAN DAN SARAN

Konselor yang efektif adalah konselor yang dapat memahami keadaan budayanya sendiri dan kondisi budaya konseli. Dimana hal ini dapat mempengaruhi keefektifan dari proses konseling yang dilakukan. Merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi seorang konselor untuk dapat menginternalisasi nilai budaya tersebut agar dapat menerima konseli tanpa syarat, bukan sebagai tembok pembatas antara konselor dan konseli. Menjadi seorang konselor yang memiliki kompetensi tentang multibudaya ini bukan suatu hal yang dapat muncul secara tiba-tiba, namun merupakan sebuah proses belajar yang perlu untuk dilatihkan dan dibiasakan secara berkelanjutan.

Maka disarankan kepada Guru BK/ Konselor maupun mahasiswa S1 BK dapat memperluas wawasan multibudayanya, salah satunya dengan memahami problem-problem kultural dan menerapkan strategi praktis untuk meminimalisasi problem tersebut yang telah dibahas dalam kajian konseptual pada paper ini.

DAFTAR RUJUKAN

- American Psychological Association. (2003). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. *American Psychologist*, 58, 377–402.
- Constantine, M.G., & Sue, D.W. (2005). *Strategies for Building Multicultural Competence in Mental Health and Education Settings*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Corey, G. (2017). *Theory and Practice of Counseling & Psychotherapy, Tenth Edition*. Belmont, CA: Brooks/Cole.
- Cross, M.C., & Papadopoulos, L. (2001). *Becoming a Therapist: a Manual for Personal and Professional Development*. New York: Taylor and Fancis Inc.
- Geldard, K. & Geldard, D. (2011). *Keterampilan Praktik Konseling: Pendekatan Integratif*. Terjemahan Eva Hamdiah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laungani, P. (2002). *Undertanding Mental Illness Across Culture*. London: Sage.
- Lee, C.C., & Richardson, B.L. (1991). *Multicultural Issues in Counseling: New Approaches to Diversity*. Alexandria, VA: American Association for Counseling and Development.
- Loewenthal, K.M. (2007). *Spirituality and Cultural Psychiatry*. New York: Cambridge University Press.
- Mappiare-AT, A. (2011). *Konseling Postmodern: Mampukah Membentuk Karakter Berbasis Budaya Unggul Nusantara?* Makalah bahan diskusi. Seminar Nasional dengan Tema “Konseling Post-Modern dan Pendidikan Karakter Bangsa”, FIP UNESA di Surabaya, tanggal 7 Mei.
- Mappiare-AT, A. (2020). *Modul Satu KIPAS: Rasional, Pandangan Filosofis, dan Teori Kepribadian KIPAS*. Malang: Jurusan BK, FIP, UM.
- Matsumoto, D. (2008). *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*. Terjemahan: Anindito Aditomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Setyaputri, N.Y., Krisphianti, Y.D., & Nawantara, R.D. (2020). *BADRANAYA: Media Inovatif Kultural untuk Memperdalam Karakter Adil Calon Konselor Multibudaya*. Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung.
- Setyaputri, N.Y., Krisphianti, Y.D., & Nawantara, R.D. (2021). Badranaya: A Board Game to Enhance Prospective Multicultural Counselors' Impartial Character. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 6(1): 24-33.
- Setyaputri, N.Y. (2022). Badranaya Sebagai Inovasi Layanan BK di Era Disrupsi (Media BK dan Konsep Pendekatan Konseling Multibudaya). *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 1(1): 1-12.
- Sims, A. (2007). *Spiritual Aspect of Management*. New York: Cambridge University Press.
- Sue, D.W., & Sue, D. (1990). *Counseling the Culturally Different-Theory and Practice*. New York: Wiley.
- Stuart, R.B. (2004). Twelve Practical Suggestions for Achieving Multicultural Competence. *Professional Psychology: Research and Practice*, 35(1): 3-9.
- Tirmizi, S.A. (2008). *Effective Multicultural Teams: Theory and Practice*. USA: Springer Science and Business Media.